

Diskriminasi berdasar Identitas Sosial-Budaya dan Pendidikan HAM di Indonesia dalam Perspektif Psikologi Sosial

Monica E. Madyaningrum

Fakultas Psikologi Universitas Katolik Sanata Dharma

Abstract

The high rate of serious human rights abuses in Indonesia has many cases of human right abuses which happen among common people in their everyday life unnoticed. One of the examples is the cases of discrimination based on one's socio-cultural identity. The paper argues that discrimination based on one's socio-cultural identity is a form of human right violation which its mechanism involves one's social cognitive system. That is why its intervention could not rely solely on judicial intervention. An intervention which is addressed the psychological functioning of individuals which contributes to the occurrence of discrimination is also needed. It is therefore, using social psychology perspective; the paper aims to identify the social cognitive functioning which may become the underlying mechanism of discriminative attitudes and behavior among common people in Indonesia. Later, the paper uses the findings to discuss its implication in regard with the concept of human rights education.

Keywords: *discrimination, social psychology, stereotype and prejudice, human right education.*

Gagasan awal dari makalah ini muncul dari hasil pencermatan terhadap sebuah forum diskusi *on-line* di situs komunikasi umum, *kaskus: the largest Indonesian community* (www.kaskus.us). Satu kanal dalam situs ini, bernama *Debate Club*, memberi ruang bagi anggotanya untuk melempar dan menanggapi topik perdebatan tentang segala info, mulai gaya hidup, hal-hal yang sedang populer hingga peristiwa-peristiwa terkini. Dalam salah satu *posting*-nya, seorang anggota dengan nama samaran '*BayiBadaK*' memunculkan topik debat tentang 'Adanya diskriminasi ras di lingkungan kerja' (www.kaskus.us/showthread.php?t=1053093). Berikut adalah potongan tampilan dari *posting* tersebut.

Saya adalah seorang indo yang mempunyai darah keturunan Tionghoa. Saya juga memiliki

banyak teman yang berasal dari ras dan kalangan yang bermacam-macam. Yang ingin saya sharingkan disini adalah, Pernah ga sih kalian mengalami diskriminasi ras di tempat kerja. Contoh yang saya lihat sendiri:... Ada teman pribumi yang bekerja menjadi programmer freelancer, yang kesusahan kalau mendapati calon customer yang keturunan. Dimana biasanya yang warga keturunan Tionghoa lebih mempercayai klien yang juga keturunan Tionghoa juga. Ada juga teman pribumi yang bekerja di suatu perusahaan, dimana dia merasa susah dalam hal promosi, gaji, relasi. Jika dibandingkan dengan teman kerjanya yang keturunan Tionghoa. Ada juga teman pribumi yang mendirikan usaha sendiri, pernah juga ia mendapati kesusahan jika mau

Korespondensi: **Monica E. Madyaningrum**, Fakultas Psikologi Universitas Katolik Sanata Dharma.Paingan, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta. Telp (0274) 883037 Fax (0274) 886529 email: eviandaru@yahoo.com

bekerja sama dengan keturunan Tionghoa. Karena pengusaha keturunan Tionghoa lebih percaya dengan pengusaha yang keturunan Tionghoa juga. Contoh-contoh yang saya berikan diatas memang bukan meliputi semuanya. Tetapi hanya contoh kecil dari fakta yang ada di masyarakat. Oya, saya belum menemui sih kalau ket Tionghoa didiskriminasi di dunia pekerjaan, kecuali di bidang: politik dan pemerintahan (co : PNS, polisi, ABRI, dll). Nah, saya sampai sekarang masih bingung. Mengapa adanya diskriminasi ras di dunia kerja ini...

Topik ini mendapat sekitar 200 tanggapan dengan beragam isi dan nada. Sejumlah anggota memberikan pembenaran atau dukungan terhadap topik yang dilemparkan tersebut dengan menambahkan bukti pengalaman pribadi atau orang lain disekitarnya yang dipercaya merupakan bentuk diskriminasi rasial.

Menimbang karakteristik forum diskusi *on-line*, dimana keanggotaan peserta seringkali bersifat *anonymous*, tentu saja sangat sulit menarik kesungguhan intensitas dari komentar-komentar yang terlontar dalam *Debate Club* di atas. Sama sulitnya untuk memastikan apakah pengalaman-pengalaman yang dimunculkan sebagai data pendukung komentar mereka merupakan sesuatu yang sungguh terjadi dan dialami atau hanya karangan dari pemberi komentar. Dengan demikian, signifikansi komentar-komentar diatas sebagai potongan potret sosial masyarakat Indonesia dapat dengan mudah disangsikan. Namun demikian, terlepas dari persoalan kesahihan komentar-komentar tersebut, kemunculannya dalam forum diskusi *on-line* menegaskan bahwa (masih) ada sikap dan pandangan yang diskriminatif dalam masyarakat kita.

Menggunakan istilah psikoanalisa Freudian (Hjelle & Ziegler, 1992), barangkali sikap dan pandangan diskriminatif yang muncul dalam forum diskusi tersebut dapat dilihat sebagai *id* yaitu suatu dorongan dan kebutuhan yang tidak dapat dimunculkan secara terbuka dalam interaksi sosial sehari-hari di tengah masyarakat karena bertentangan dengan *superego* masyarakat yang berisi standar moral, norma, kaidah dan nilai yang diidealkan secara sosial. Maka dalam kanal-kanal

diskusi *on-line* seperti inilah, dimana seseorang dapat berkomentar tanpa diketahui identitas aslinya, mereka yang memiliki sikap dan pandangan yang bertentangan dengan standar ideal masyarakat menemukan ruang aman untuk menyatakan pendapatnya.

Sikap dan pandangan diskriminatif semacam inilah yang sedianya akan disasar dengan KUHP anti diskriminasi (Saptaningrum & Wiryawan, 2007). Persoalannya, sikap dan pandangan diskriminatif semacam ini seringkali sangat sulit untuk dibuktikan secara legal formal karena sikap dan pandangan semacam ini lebih banyak muncul dalam ruang-ruang percakapan dan interaksi sehari-hari. Disinilah terletak tantangan persoalan yaitu di satu sisi ada individu yang merasa dilanggar hak asasinya akibat sikap dan perlakuan diskriminatif berdasar identitas sosial-budayanya, namun di sisi lain sangat sulit untuk membuktikan dasar-dasar sikap dan perlakuan diskriminatif tersebut secara legal formal.

Diskriminasi rasial di dunia kerja seperti yang terekam dalam kutipan diatas bisa jadi hanya satu contoh dari masih banyak bentuk-bentuk diskriminasi lain yang ada di tengah masyarakat. Kutipan diatas mencontohkan apa yang disebut sebagai '*everyday racism*' (Jones, 1997). Istilah ini digunakan untuk menengarai bentuk-bentuk diskriminasi berdasar identitas sosial budaya seseorang, yang susah untuk dibuktikan dan diintervensi secara legal formal, namun terus muncul dalam percakapan, perilaku dan kebiasaan sehari-hari. Bukti keberadaannya ada pada pengalaman-pengalaman pribadi dari orang-orang yang merasa didiskriminasi karena identitas sosial budayanya, seperti agama, etnis, gender dan atau gabungan dari kesemuanya. Inilah yang mendasari makalah ini untuk menggunakan istilah 'diskriminasi berdasar identitas sosial-budaya' dan bukan 'diskriminasi rasial' meski contoh kasus yang digunakan dalam makalah ini merupakan bentuk diskriminasi rasial. Istilah 'diskriminasi berdasar identitas sosial-budaya' didefinisikan sebagai segala bentuk sikap dan perilaku yang membedakan atau menghalangi seseorang untuk menggunakan hak-haknya atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, atau keyakinan politik (Saptaningrum & Wiryawan, 2007).

Dalam rangka mempertegas upaya negara untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi yang melanggar hak asasi manusia, pemerintah telah mensahkan Undang-Undang Anti Diskriminasi pada tahun 2008. Mengacu pada undang-undang tersebut, maka kini segala bentuk diskriminasi berdasar identitas sosial-budaya seseorang sebagaimana didefinisikan diatas dapat dilihat sebagai tindak pidana (Saptaningrum & Wiryawan, 2007).

Beberapa bulan setelah pengesahan undang-undang tersebut, surat kabar nasional *Jakarta Post* memuat laporan berjudul "*Ethnic Chinese still face hurdles to get ID cards: Survey*" (16 Desember 2008). Laporan ini hanyalah satu contoh dari sejumlah laporan sejenis yang dapat ditemukan di media massa. Hal ini menunjukkan bahwa meski Undang-Undang Anti Diskriminasi telah disahkan, praktek diskriminatif tetap terjadi di tengah masyarakat. Contoh ini menggambarkan ungkapan yang menyatakan bahwa "*Stateways cannot change folkways*" (Sumner dalam Jones, 1997). Hal ini menegaskan bahwa upaya menghilangkan sikap dan praktik diskriminatif di tengah masyarakat tidak dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan piranti hukum.

Dalam persoalan diskriminasi, intervensi hukum biasanya difokuskan pada upaya penciptaan atau pembongkaran sistem dan struktur sosial yang dinilai dapat mendukung atau menghambat penegakan hak asasi manusia. Namun demikian, artikel surat kabar yang dikutip diatas menunjukkan bahwa seseorang tetap dapat mengalami atau melakukan praktik diskriminatif terlepas dari sistem dan struktur sosial masyarakatnya (Jones, 1997). Disinilah makalah ini melihat perlunya mengkaji persoalan diskriminasi dari sisi individu yang melakukannya. Maka, psikologi sosial sebagai disiplin yang berupaya menjelaskan keterkaitan antara perilaku individu dan konteks sosial yang melingkupinya, dinilai menjadi pendekatan yang tepat untuk mengulas topik tersebut.

Diskriminasi berdasar Identitas Sosial-Budaya dalam perspektif Psikologi Sosial

Sebagai satu disiplin dalam rumpun sosial-humaniora, kekhasan psikologi sosial terletak

pada upayanya untuk menjelaskan proses mental yang mendasari kemunculan perilaku individu dalam kelompoknya (Baron & Byrne, 2000; Feldman, 1998; Taylor, Peplau & Sears, 2009). Demikian halnya dalam persoalan diskriminasi. Fokus perhatian psikologi sosial adalah mengkaji proses mental atau dinamika psiko-sosial yang mendasari kemunculan sikap dan perilaku diskriminatif (Jones, 1997; Plous, 2003).

Banyak studi psikologi sosial meyakini bahwa stereotip merupakan motor yang menggerakkan prasangka (Baron & Byrne, 2000; Jones, 1997). Selanjutnya, ketika mendapat stimulasi dan konteks sosial yang tepat, prasangka akan mendorong munculnya sikap dan perilaku diskriminatif (Jones, 1997). Berangkat dari pandangan dasar inilah, maka banyak studi psikologi sosial tentang diskriminasi difokuskan pada upaya menjawab pertanyaan bagaimana proses terbentuknya stereotip dan prasangka dalam diri individu (Jones, 1997).

Secara klasik, ada dua model penjelasan yang ditawarkan studi-studi psikologi sosial dalam menjawab pertanyaan tentang proses terbentuknya stereotip dan prasangka. Pertama adalah model yang disebut sebagai '*social competition approach*' (Jones, 1997). Model ini mengasumsikan bahwa stereotip dan prasangka merupakan respon kognitif yang dimunculkan individu sebagai strategi dalam menghadapi konflik antar kelompok. Pendekatan ini berpandangan bahwa ketika interaksi antar kelompok diikuti dengan munculnya kompetisi sosial maka konflik antar kelompok akan hadir sebagai konsekuensinya. Konflik antar kelompok inilah yang selanjutnya akan mendorong individu-individu dari masing-masing kelompok untuk memunculkan respon kognitif berupa cara pandang yang mengunggulkan kelompok sendiri dan merendahkan kelompok orang lain. Dari sinilah pola pikir 'kita' dan 'mereka' terbentuk dan selanjutnya dapat berkembang menjadi stereotip dan prasangka (Meek, 1998).

Menolak asumsi dasar model pertama, model penjelasan klasik kedua berpandangan bahwa kemunculan stereotip dan prasangka tidak harus selalu terkait dengan adanya konflik antar kelompok (Jones, 1997). Model ini dikenal dengan istilah '*social categorization approach*' (Jones, 1997, hlm. 208). Pendekatan ini berpandangan

bahwa pada dasarnya stereotip dan prasangka merupakan konsekuensi alamiah dari pola pikir kategorial yang ada dalam setiap kognisi individu. Menurut model ini, setiap individu memiliki kecenderungan alamiah untuk mengolah informasi dalam kategori-kategori guna memudahkan penentuan respon kognitif dan perilaku yang dinilai tepat. Inilah yang mendasari kecenderungan setiap individu untuk membedakan kelompoknya dari kelompok yang lain dengan cara membuat kategori-kategori sosial yang memisahkan 'kita' dan 'mereka' (Meek, 1998).

Disinilah letak perbedaan dasar model penjelasan pertama dan kedua. Dalam model penjelasan pertama, konflik antar kelompok dilihat sebagai motor penggerak munculnya kecenderungan pengkategorian 'kita' dan 'mereka' yang selanjutnya dapat berkembang menjadi seterotip dan prasangka. Dengan demikian, pendekatan ini berpandangan bahwa tanpa konflik tidak akan ada stereotip dan prasangka. Sebaliknya, model penjelasan kedua berpandangan bahwa stereotip dan prasangka merupakan hasil dari adanya kecenderungan kognitif alamiah dalam setiap individu untuk mengolah informasi secara kategorial. Dengan kata lain, menurut model penjelasan kedua, tanpa konflik antar kelompok pun, pola kognitif kategorial 'kita' dan 'mereka' tetap akan ada dalam struktur kognitif setiap individu ketika mereka terlibat dalam interaksi antar kelompok.

Meski kedua model penjelasan klasik diatas memiliki perbedaan asumsi dasar tentang bagaimana seterotip dan prasangka terbentuk, namun terlihat bahwa keduanya meletakkan seterotip dan prasangka sebagai bagian dari proses kognitif individu. Keduanya mengasumsikan bahwa ada kecenderungan kognitif dalam setiap individu untuk mengunggulkan kelompoknya dan merendahkan kelompok lain (Plous, 2003). Berangkat dari sinilah kemudian muncul konsep-konsep berikutnya yang difokuskan pada upaya mengidentifikasi lebih jauh proses kognitif yang dialami individu ketika terlibat dalam interaksi antar kelompok yang diwarnai dengan sikap dan perilaku diskriminatif.

Secara garis besar ada dua ranah utama yang coba ditelusuri lebih jauh oleh studi-studi psikologi sosial di wilayah ini. Pertama adalah

konsep-konsep yang dikembangkan untuk menjelaskan mengapa ketika seseorang bergabung dalam kelompok cenderung memiliki pola pikir bahwa kelompoknya lebih unggul dari kelompok lain. Salah satu konsep yang berusaha menjawab pertanyaan ini adalah *Social Identity Theory* (Jones, 1997). Teori ini mengasumsikan bahwa identitas kelompok merupakan komponen penting dalam pembentukan identitas diri seseorang. Maka sebagai konsekuensinya, setiap individu akan berusaha memiliki kebanggaan akan kelompoknya agar sebagai akibatnya ia merasa bangga dengan dirinya. Kebanggaan ini biasanya dibangun dengan cara membentuk dan mengenakan berbagai atribut positif pada kelompok yang dinilai dapat mengunggulkan kelompoknya dari kelompok yang lain. Dari sinilah kecenderungan untuk merendahkan kelompok lain dengan menggunakan seterotip dan prasangka dapat bermula.

Selain konsep diatas, ranah kedua yang juga banyak dikembangkan dalam studi psikologi sosial adalah konsep-konsep yang bertujuan menjelaskan strategi-strategi sosial dan kognitif yang dikembangkan seseorang untuk secara psikologis mempertahankan keunggulan kelompoknya dibanding kelompok lain. Diantara konsep-konsep dalam kelompok ini misalnya adalah konsep '*out-group homogeneity*' (Jones, 1997). Konsep ini menerangkan kecenderungan seseorang untuk melihat secara seragam individu-individu yang menjadi anggota kelompok lain. Dalam konsep ini diterangkan bahwa, ketika seseorang mengenakan stereotip dan prasangka pada individu-individu dari kelompok lain, orang tersebut akan melakukan proses de-individuasi pada anggota-anggota kelompok lain tersebut. Proses de-individuasi menggambarkan bias kognitif yang terjadi ketika seseorang cenderung melihat seluruh anggota kelompok lain sebagai satu entitas yang sama. Dalam proses ini, anggota-anggota kelompok yang lain, tidak dilihat sebagai individu yang masing-masing memiliki keunikan identitas. Bias kognitif inilah yang diasumsikan mendasari bekerjanya seterotip dan prasangka. Ketika satu kelompok distereotipkan memiliki atribut negatif tertentu misalnya, maka diyakini bahwa atribut tersebut dapat ditemui pada seluruh anggota kelompok tanpa kecuali (Meek, 1998; Plous, 2003).

Selain konsep *outgroup homogeneity*, konsep lain yang juga menjelaskan bias kognitif yang dimiliki seseorang yang mendasari bekerjanya stereotip dan prasangka dalam relasi antar kelompok adalah konsep *illusory correlation* (Jones, 1997). Konsep ini menerangkan proses ketika seseorang mempersepsikan dua hal sebagai sesuatu yang saling terkait dalam hubungan sebab akibat padahal dalam kenyataannya tidak. Misalnya sebagai contoh adalah stereotip tentang peran gender yang terlanjur diterima sebagai suatu kepastian dalam masyarakat. Seringkali distereotipkan bahwa laki-laki lebih agresif daripada perempuan. Dalam bias gender ini, *illusory correlation* terjadi ketika seseorang meyakini bahwa ada hubungan sebab akibat yang otomatis antara berjenis kelamin laki-laki dengan pemilikan sifat atau perilaku agresif.

Paparan di atas secara singkat memberi gambaran kekhasan psikologi sosial dalam mengkaji persoalan diskriminasi. Terlepas dari perbedaan asumsi dasar dan fokus kajian, ditemukan kesamaan bahwa studi psikologi sosial tentang diskriminasi cenderung membahas persoalan diskriminasi dari elemen dasar yang diasumsikan menjadi akar kemunculan sikap dan perilaku diskriminatif pada tataran individual yaitu stereotip dan prasangka. Lebih lanjut, beragam studi psikologi sosial di area ini menunjukkan bahwa stereotip dan prasangka sebagai akar dari sikap dan perilaku diskriminatif kemunculan dan keberlangsungannya ditopang oleh keterperangkapan berpikir atau bias kognitif yang terjadi pada tataran individual (Baron & Byrne, 2000; Jones 1997; Plous, 2003)

Atas fokusnya pada proses kognitif yang mendasari sikap dan perilaku diskriminatif, psikologi sosial seringkali dikritik karena dinilai terlalu menyederhanakan persoalan diskriminasi semata-mata sebagai akibat dari 'gangguan' dalam proses kognitif individu. Studi psikologi sosial dianggap abai dengan peran dari faktor dan perangkat sosial masyarakat yang secara sistemik mengkondisikan terciptanya dan tetap berlangsungnya sikap dan perilaku diskriminatif dalam kehidupan sehari-hari masyarakat (Meek, 1998; Richards, 1997). Namun, sejumlah studi menegaskan bahwa fokus pada proses kognitif individu yang mendasari kemunculan sikap dan perilaku diskriminatif diambil bukan dalam

rangka men-psikopatologi-kan persoalan diskriminasi atau sekedar melihatnya sebagai abnormalitas perilaku individu, dan dengan demikian dapat diselesaikan dengan terapi individual sebagai intervensinya. Justru, pilihan ini diambil untuk menunjukkan bahwa mengatasi persoalan diskriminasi diperlukan beragam strategi intervensi yang beroperasi di berbagai tingkatan, mulai dari tingkatan mikro yang diarahkan pada pola persepsi dan kognisi individu, tingkatan interpersonal, sampai tingkatan makro yang diarahkan pada struktur sosial dalam masyarakat yang menciptakan situasi diskriminatif (Jones, 1997; Plous, 2003).

Diskriminasi berdasar identitas sosial budaya seringkali memang merupakan produk sistemik dari sejarah serta situasi sosial, politik, ekonomi dan budaya suatu masyarakat. Sumbangan studi psikologi sosial adalah menunjukkan bahwa kemunculan dan keberlangsungan diskriminasi tersebut difasilitasi, ditopang dan dikukuhkan oleh proses individual di dalam sistem kognitif individu yang seringkali berfungsi secara otomatis (Jones, 1997). Berangkat dari pemahaman inilah maka dalam pendekatan psikologi sosial, intervensi terhadap persoalan diskriminasi dinilai perlu untuk dimulai dari mengidentifikasi dan membongkar bentuk-bentuk keterperangkapan berpikir atau bias kognitif pada tataran mikro individual yang dinilai mencerminkan dan menopang keberlangsungan struktur makro masyarakat yang diskriminatif. Maka pada bagian selanjutnya dari makalah ini akan didiskusikan bias-bias kognitif semacam apa yang diduga mendasari sikap dan perilaku diskriminatif yang ada di masyarakat kita.

Diskriminasi: Si(Apa) yang Salah?

Pada bagian ini makalah ini akan kembali menggunakan kutipan-kutipan opini masyarakat awam yang dimuat dalam media komunikasi publik, yaitu forum diskusi *on-line* dan kolom surat pembaca surat kabar sebagai data untuk dianalisa. Cara pemilihan dan pengambilan data dalam makalah ini dilakukan dengan tidak mengacu pada kerangka metodologi tertentu. Maka disadari bahwa tema-tema yang akan diangkat dari potongan-potongan data yang ditampilkan tidak dapat dibaca sebagai representasi yang memadai dari persoalan

diskriminasi berdasar identitas sosial budaya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Analisa yang menjadi isi dari bagian ketiga makalah ini lebih dimaksudkan sebagai sebuah proses identifikasi awal.

Dari hasil pencermatan terhadap 200 *entry* pada kanal *debate club* dari situs komunikasi umum, *kaskus*; serta sejumlah komentar yang dimuat dalam kolom surat pembaca, surat Kabar nasional *Jakarta Post*, terkait dengan topik diskriminasi rasial; berikut adalah kutipan-kutipan yang diduga mencerminkan bentuk keterperangkapan berpikir atau bias kognitif yang mendasari sikap dan perilaku diskriminatif dalam masyarakat. Ada tiga bentuk bias kognitif yang muncul dalam sejumlah komentar.

1. Menyalahkan Korban, Membenarkan Diskriminasi

Berikut ini adalah kutipan komentar dari kanal diskusi *on-line kaskus*, menanggapi lontaran topik dari salah satu anggota tentang adanya diskriminasi rasial ditempat kerja. Kutipan ini dikirim oleh anggota dengan inisial 'Raiders':

"...secara garis besar hal ini [diskriminasi] terjadi karena perilaku dan sifat dasar. Kenapa Cokin [Tionghoa] lebih diminati daripada pribumi?. 1. Dari segi kerajinan: Cokin lebih rajin, pekerjaan diselesaikan tanpa banyak omong, Pribumi suka mengeluh, gaji kecil, kerjaan susah..., 2. Dari segi kerapian: Cokin lebih rapi n teliti, lebih bertanggung jawab, Pribumi suka teledor dan masa bodoh, toh bukan perusahaannya..., 3. Dari segi pemakaian waktu: Cokin lebih disiplin, datang tepat waktu, pulang sesudah pekerjaan selesai, Pribumi datang sering telat, 1001 alasan, 20 menit sebelum pulang udah beres-beres n begitu teng kabur..." (www.kaskus.us/showthread.php?t=1053093)

Kutipan diatas mencontohkan bias kognitif yang disebut dengan istilah *victim blaming* (Nelson & Prilleltensky, 2005). Kutipan diatas mencerminkan asumsi dasar bahwa situasi ketidakadilan, dalam hal ini diskriminasi, dipercaya sebagai akibat dari kekurangan atau kesalahan yang dilakukan oleh korban. Dengan menempatkan korban sebagai 'sumber masalah' maka praktik diskriminatif yang terjadi dianggap

sah dan dapat diterima. Inilah yang disebut dengan *illusory correlation* (Jones, 1997), kedisiplinan atau kemalasan seseorang dalam bekerja dianggap sebagai akibat dari identitas etnisnya. Dalam bias kognitif semacam ini, setiap pihak korban ataupun pelaku diskriminasi dianggap telah mendapatkan apa yang sepatutnya didapatkan (Plous, 2003).

Berikut adalah contoh komentar lain yang menggambarkan bias kognitif yang serupa. Komentar ini dikirimkan oleh anggota dengan inisial 'x369z5qq6'

"Kuncinya jangan kerja sama Cina...Kalaupun terpaksa kerja sama Cina, niatin buat belajar, walopun cina2 itu pelit, diem2 curi aja ilmunya... dah pinter buka sendiri deh... intinya biar gimanapun Cina tuh eksklusif & rasis...baru baik kalo ada kepentingan...jadi dalam hal apapun jangan terlalu percaya sama cina..." (www.kaskus.us/showthread.php?t=1053093)

Kembali tampak dalam kutipan diatas bahwa di mata pemberi komentar tindakan mendiskriminasi dianggap sah untuk dilakukan karena 'kesalahan' yang dilakukan korban yaitu korban dinilai 'eksklusif dan rasis'. Tampak dalam kedua contoh kutipan diatas bahwa bias kognitif 'menyalahkan korban' menghalangi munculnya pemahaman kritis bahwa adanya tindakan atau kebiasaan yang dinilai merugikan dalam diri seseorang tidak dengan sendirinya melegitimasi atau memberi hak pada pihak yang merasa dirugikan untuk melakukan diskriminasi pada orang tersebut dan kelompoknya.

2. Stereotip dinilai sebagai produk genetis

Bias kognitif berikutnya yang muncul dalam sejumlah komentar adalah asumsi bahwa stereotip yang digunakan sebagai dasar pembenaran diskriminasi diyakini bersumber pada sifat dasar yang secara inheren dimiliki seseorang karena terlahir dengan identitas etnis tertentu. Berikut adalah salah satu contoh kutipan yang dikirimkan oleh anggota dengan inisial 'Hakim Garis'

"kalo dipikir kadang tidak logis. Cina cuma berapa persen sih di Indo? Dibandingkan dengan pribumi yang jumlahnya berapa ribu kali lipat dari mereka, kalo mereka diskriminan dan memprioritaskan ras sendiri dalam setiap aspek kehidupan tapi toh pada akhirnya lebih

maju dari pribumi salah siapa coba? Penjelasmnya yang paling logis cuma satu: Keturunan Cina emang lebih superior dalam segala hal dibandingkan pribumi asli" (www.kaskus.us/showthread.php?t=1053093)

Bias kognitif semacam inilah yang mengakibatkan keyakinan seseorang akan stereotip menjadi sulit dibongkar. Hal ini karena seterotip dianggap bersumber pada kebenaran faktual yang bersifat kodrati (Setiawan, 2005).

3. Besar berarti benar

Bentuk bias kognitif ketiga yang dijumpai dalam komentar-komentar awam terhadap persoalan diskriminasi rasial adalah pandangan bahwa menjadi mayoritas dengan sendirinya memberi hak untuk mendahulukan kepentingan kelompoknya dan memarginalkan minoritas. Berikut adalah contoh kutipannya dari anggota dengan inisial 'JJRambo'

"Halaaaah itu diskriminasi mah biasa, coba kalo Cokin [Tionghoa] kerja di perusahaan pribumi apa gak digencet juga gajinya? Apa gak dikatain Cinaz mulu saat kerja di dalam perusahaan pri [pribumi] nih???...gw pernah kerja di tengah pribumi dan bosnya pribumi... apaan gw juga mendapat kepreatan pelecehan rasialis dan gaji ndak adil tuh! Tapi gw akhirnya sadar... gw dimana? Ini salah gw sendiri kenapa mau kerja di sikon begini. Ujungnya gw harus menyadari ini semua kesalahan diri sendiri kenapa mau kerja dalam lingkungan mereka [pribumi]..." (www.kaskus.us/showthread.php?t=1053093).

Tampak dalam komentar diatas bahwa pemberi komentar menilai diskriminasi terjadi karena 'kesalahan' korban sendiri yang memilih untuk bekerja di lingkungan yang menemukannya dalam kategori minoritas. Komentar semacam ini menegaskan bias kognitif yang memandang bahwa diskriminasi yang dilakukan kelompok mayoritas terhadap minoritas merupakan suatu kewajaran. Lebih lanjut, bias kognitif semacam ini biasanya kemudian diikuti dengan pandangan bahwa untuk menghindari situasi diskriminatif yang lebih buruk diharapkan mereka yang dari kelompok minoritas harus dapat menyesuaikan diri dengan 'aturan main' yang ditetapkan sepihak oleh

kelompok mayoritas. Hal ini tentu saja berkebalikan dengan prasyarat ideal dari masyarakat yang mengedepankan hak asasi manusia, yang salah satunya ditandai dengan adanya kesadaran dan inisiatif dari kelompok mayoritas untuk memiliki kepekaan terhadap kelompok minoritas (Fritzsche, 2004; Nelson & Prilleltensky, 2005). Terbentuknya kepekaan itu sendiri mensyaratkan adanya kesadaran kritis dari kelompok mayoritas akan status mayoritasnya dan segala konsekuensi yang melekat padanya yang dapat secara sengaja atau tidak sengaja merugikan kelompok minoritas (Green & Sonn, 2006).

Berikut adalah contoh kutipan lain yang menggambarkan bias kognitif serupa. Kutipan ini diambil dari kolom surat pembaca surat kabar nasional *Jakarta Post*. Surat ini dikirimkan pembaca yang bernama Sumarsono Sastrowardoyo sebagai tanggapan terhadap artikel berjudul "*Equality and pluralism in the Citizenship law*" yang ditulis oleh Frans H. Winarta (*Jakarta Post*, 28 September 2006).

"...Discrimination is a natural fact in this world, and even in democratic countries like the United States it still flourishes, although according to the U.S. constitution all men are created equal. The best attitude toward discrimination is to join the crowd: don't stay in your own compound, go to a government school, join the bureaucracy as a village head, regent or minister. Join a political party and become a legislator, join the police and army. Work with the locals how to find a solution for our common problems. Be proud of our country, our flag and national hymn and worry together with the rest of us over the future of this country... When I was in the U.S. for a limited time with my family, I put my children in a public school; my wife participated in neighborhood activities and I joined my friends drinking beer and we went to church and had a Christmas tree at home, although we are Muslims. At the end of our stay we said goodbye to our friends and they were all surprised that we were going home. They thought we were full-blooded American citizens. And we never discussed discrimination" (Jakarta Post, 23 Oktober 2006)

Komentar diatas menegaskan dua bias

kognitif. Pertama, diskriminasi dipandang sebagai 'fakta alamiah' yang terjadi dimana-mana. Hal ini secara implisit menempatkan diskriminasi sebagai situasi yang seolah tak terhindarkan. Asumsi ini kemudian mengarahkan pada bias kognitif yang kedua, karena diskriminasi tak terhindarkan, maka mereka yang potensial mengalami diskriminasi-lah (minoritas) yang harus mengesampingkan kepentingannya dan mengikuti 'aturan main' yang ditetapkan oleh kelompok mayoritas.

Inilah tiga bentuk bias kognitif yang ditemukan dari hasil pencermatan terhadap sejumlah komentar awam terhadap persoalan diskriminasi sebagaimana terdokumentasi dalam media komunikasi publik. Bagaimana kemudian menindaklanjuti identifikasi bias-bias kognitif semacam ini dalam perumusan program atau kebijakan publik yang terkait dengan kerangka besar penegakan hak asasi manusia? Program atau media semacam apa yang dapat memfasilitasi proses pengidentifikasian dan pembongkaran bias-bias kognitif yang dapat mengakibatkan munculnya interaksi sosial sehari-hari yang diskriminatif. Disinilah makalah ini berpendapat bahwa pendidikan HAM dapat menjadi program atau media yang dapat mengintegrasikan proses pengidentifikasian dan pembongkaran bias-bias kognitif sebagai salah satu materinya.

Mengapa Pendidikan HAM?

Ada sejumlah model intervensi yang ditawarkan dalam psikologi sosial untuk mengatasi persoalan stereotip, prasangka dan diskriminasi. Secara umum model-model tersebut dapat dikategorikan dalam dua kelompok yaitu model intervensi yang fokuskan pada pelaku diskriminasi dan model intervensi yang difokuskan pada korban diskriminasi (Jones, 1997).

Diantara model intervensi yang difokuskan pada pelaku diskriminasi adalah intervensi yang bertujuan untuk memodifikasi proses kognitif di tingkat individual. Hal ini terkait dengan kekhasan studi psikologi sosial yang mengasumsikan bahwa stereotip dan prasangka sebagai akar diskriminasi merupakan problem kategorisasi kognitif yang muncul akibat pola pikir 'kita' dan 'mereka'. Dua model modifikasi kognitif yang ditawarkan adalah *decategorization* dan

category disconfirmation through member typicality (Jones, 1997, hlm. 313-316). *Decategorization* menerangkan proses seseorang untuk melepaskan diri dari kebiasaan kognitif yang cenderung meletakkan orang lain dalam kategori-kategori kelompok, misal kelompok suku, agama, atau gender. Proses ini merupakan proses pembalikan dimana individu berusaha untuk menempatkan dan menyikapi orang lain pertama-tama sebagai seorang individu dan bukan sebagai anggota kelompok tertentu. Sedangkan, pada model kedua, pembongkaran pola pikir kategorial dilakukan dengan mengkonfrontasi informasi stereotipikal yang menjadi dasar munculnya prasangka. Hal ini dilakukan dengan menghadirkan dalam ruang perhatian publik individu-individu yang memiliki karakteristik positif yang berasal dari kelompok tertentu yang biasanya diasosiasikan dengan stereotip negatif (Jones, 1997).

Mencermati paparan singkat model intervensi diatas, tampak bahwa secara umum yang dikaji dalam studi psikologi sosial adalah proses dasarnya. Maka apa yang ditawarkan oleh psikologi sosial tentu saja tidak dapat berdiri sendiri sebagai sebuah program intervensi. Diperlukan suatu medium dimana model intervensi psikologi sosial yang lebih difokuskan pada proses dasar di tingkat individual dapat diintegrasikan sebagai bagian dari program yang lebih luas. Disinilah makalah ini berargumen bahwa pengidentifikasian dan pembongkaran bias kognitif yang mendasari sikap dan perilaku diskriminatif dipandang dapat diintegrasikan sebagai bagian dari program pendidikan HAM.

Dalam studi psikologi sosial dikatakan bahwa stereotip terbentuk melalui proses sosialisasi kultural yang terjadi secara terus menerus dan kemudian diinternalisasikan dalam struktur kognitif individu (Jones, 1997). Inilah mengapa menjadi sangat susah untuk membongkar stereotip karena keberadaannya yang ditopang secara internal oleh proses kognitif individu dan dikukuhkan secara eksternal oleh praktek sosial-budaya yang ada di masyarakat. Maka diyakini bahwa model intervensi '*short cut*' (program jalan pintas) bukan pilihan yang tepat dalam persoalan ini. Disinilah program pendidikan HAM yang lebih diarahkan pada investasi jangka panjang dipandang menjadi

payung intervensi yang lebih tepat.

Apabila program pendidikan HAM diletakkan dalam konteks spesifik pendidikan HAM di sekolah, maka persoalan diskriminasi memang telah menjadi salah satu pokok bahasan dalam materi pendidikan HAM di sekolah Indonesia (Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas, 2004). Pokok bahasan ini termasuk dalam kelompok materi yang ditargetkan bagi siswa sekolah menengah. Dalam buku panduan *Rencana Pelajaran Hak Asasi Manusia*, yang disusun oleh Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas (2004, hlm. 78), disebutkan 3 tujuan yang ingin dicapai melalui pokok bahasan diskriminasi adalah 1. Membuat siswa mampu menyebutkan dampak diskriminasi etnis, 2. Membuat siswa mampu menyebutkan sikap dan perilaku yang menunjukkan kejujuran, tenggang rasa dan pengertian, dan 3. Mengajak siswa membahas konsep 'bebas dari diskriminasi'. Bentuk kegiatan kelas yang dirancang untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya adalah dengan mengenali dan mendiskusikan stereotip-stereotip etnis yang ada di masyarakat. Selanjutnya siswa diminta menjelaskan bagaimana keberadaan stereotip-stereotip tersebut dapat mempengaruhi interaksi sosial antar kelompok etnis. Dikaitkan dengan materi pembelajaran semacam ini, maka dimanakah nilai kontributif model intervensi yang ditawarkan psikologi sosial?

Salah satu prinsip yang ditekankan dalam perumusan konsep ideal pendidikan HAM, terutama dalam konteks spesifik pendidikan di sekolah, adalah bahwa materi dan metode pembelajaran harus berangkat dari pengalaman nyata peserta belajar. Dalam kerangka ini maka praktek pendidikan HAM diharapkan bukan hanya bertujuan untuk mengenalkan kepada peserta belajar konsep HAM dan kondisi masyarakat yang diidealkan, tetapi juga berisi proses refleksi atas pengalaman sehari-hari peserta belajar yang memungkinkan peserta untuk memiliki kesadaran kritis akan peran dan posisinya sebagai anggota masyarakat yang dapat secara langsung atau tidak langsung menjadi penegak, pelanggar atau korban pelanggaran HAM (Frieztzsche, 2004; Ramdhan, 2008). Disinilah dinilai model intervensi psikologi sosial yang difokuskan pada pengidentifikasian dan

pembongkaran bias kognitif yang mendasari munculnya sikap dan perilaku diskriminatif dapat berkontribusi. Model ini diandaikan dapat memfasilitasi peserta belajar untuk menyadari bahwa melalui bias kognitif yang dimiliki seseorang dapat menjadi pendukung atau pelaku diskriminasi.

Dalam materi tentang diskriminasi yang disusun oleh Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas (2004) disebutkan bahwa di akhir sesi pelajaran guru diharapkan untuk:

"mengatakan kepada siswa bahwa setiap orang memiliki bias dan stereotip terhadap orang lain. Guru menjelaskan bahwa hak asasi manusia mengandung prinsip-prinsip yang dapat dipakai untuk memeriksa dan mengoreksi bias dan stereotip kita itu mengingat bahwa stereotip mudah mengarah ke praktik-praktik diskriminasi" (hlm. 81).

Hanya saja belum dibahas dalam buku acuan tersebut bagaimana bentuk-bentuk bias kognitif dapat terbentuk dalam diri seseorang dan melalui mekanisme semacam apa hal itu akan dimunculkan. Disinilah model intervensi psikologi sosial yang difokuskan pada pengidentifikasian dan pembongkaran bias kognitif yang mendasari munculnya sikap dan perilaku diskriminatif dinilai dapat memperkaya pengalaman pembelajaran. Dengan mengenalkan bentuk-bentuk bias kognitif beserta proses pembentukan dan mekanisme kemunculannya dalam sikap dan perilaku seseorang, diharapkan pembelajaran pada materi diskriminasi dapat menghantarkan peserta belajar bukan hanya sampai pada pengetahuan tentang pengertian dan bentuk diskriminasi. Lebih luas, diharapkan hal ini dapat memfasilitasi peserta untuk sampai pada kesadaran bahwa pelanggaran HAM dapat dilakukan bukan hanya oleh para pemilik kekuasaan, baik kekuasaan politis, ekonomis maupun budaya, tetapi juga oleh setiap warga negara melalui praktek dan kebiasaan hidup mereka sehari-hari yang salah satunya adalah melalui cara mereka menerima dan memproses informasi tentang kelompok lain (Frieztzsche, 2004). Terlebih lagi, hal ini dinilai penting karena mengutip Plous (2003) seringkali membongkar akar diskriminasi pada level individual inilah yang paling susah:

"Although many countries have passed civil rights legislation over the past 50 years, discrimination continues to be a serious problem throughout the world even in democratic countries that publicly affirm the

ideal of equality... Despite the prevalence of discrimination, however, one of the greatest barriers to its removal is, strangely enough, the difficulty people detecting it at the individual level..." (hlm. 21).

PUSTAKA ACUAN

- Baron, R. A., & Byrne, D. (2000). *Social psychology* (9th ed.). Boston: Allyn & Bacon
- Feldman, R.S. 1998. *Social psychology*. (2nd ed.). New York: Prentice Hall
- Fritzsche, K. P. (2004). *Human rights education: What is it all about?* Diambil dari www.menschenrechtserziehung.de/publikationen/pdfs/HREtheses.pdf, pada tanggal 23 Juni 2009
- Green, M. J., & Sonn, C. C. (2006). *Problematising the discourse of the dominant: Whiteness and reconciliation*. *Journal of Community & Applied Social Psychology*, 16, 379 - 385.
- Hjelle, L.S. & Ziegler, D.J. (1992). *Personality theories: Basic assumptions, research and applications*. Singapore: McGraw Hill, Inc
- Jones, J. M. (1997). *Prejudice and racism* (2nd ed.). New York: The McGraw-Hill Companies Inc.
- Meek, N. (1998). *Racism, collectivism and social psychology*. *Psychological Notes*, 12. Diambil dari www.libertarian.co.uk/lapubs/psycn/psycn012.pdf pada tanggal 22 Juni 2009.
- Nelson, G. & Prilleltensky, I. (Ed.). (2005). *Community psychology: In pursuit of liberation and wellbeing*. New York: Palgrave Macmillan
- Plous, S. (2003). *The psychology of prejudice, stereotyping and discrimination: An overview*. Diambil dari www.understandingprejudice.org/draft/pdf/OverviewEnglish.pdf - pada tanggal 18 Juni 2009
- Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas (2004). *Rencana pelajaran hak asasi manusia untuk sekolah-sekolah Asia Tenggara*. Diambil dari www.unescobkk.org/fileadmin/user_upload/.../HRLP_Indonesian.pdf - pada tanggal 22 Juni 2009
- Ramdhan, D. (2008). *Mendiskusikan konsep dan praktek pendidikan HAM di sekolah*. Diambil dari researchengines.com/dadan1108.html, pada tanggal 22 Juni 2009
- Richards, G. (1997). *Race, racism and psychology: Towards a reflexive history*. London: Routledge
- Saptaningrum, I. D., & Wiryawan, S. M. (2007). *Upaya memerangi praktik diskriminasi rasial melalui sarana hukum pidana: Tinjauan atas pasal penghinaan terhadap golongan penduduk dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana*. Diambil dari kuhpreform.files.wordpress.com/.../tindak-pidana-diskriminasi-rasial_4.pdf, pada tanggal 5 Juni 2009
- Setiawan, K. (2005). *Human rights for kids: It's Difficult to get human rights education into Indonesian schools*. Diambil dari <http://www.insideindonesia.org/content/view/full/178/29/>, pada 23 Juni 2009
- Taylor, S. E., Peplau, L. A., & Sears, D. O. (2009). *Psikologi sosial* (Edisi ke-12). Jakarta: Kencana Predana Media Group
- Jakarta Post*, 28 September 2006
- Jakarta Post*, 23 Oktober 2006